



INTISARI

Peningkatan hierarki dan perubahan peran sebuah kawasan akan berdampak pada percepatan perkembangan yang terjadi, Kelurahan Aia Pacah merupakan salah satu kawasan yang mengalami percepatan perkembangan setelah ditetapkan menjadi Kawasan Pusat Pemerintah dan Perkantoran Kota Padang. Penetapan tersebut diiringi dengan pemberlakuan dokumen “RDTR Kawasan Aia Pacah Tahun 2012-2030” yang didalamnya terdapat rencana zonasi, pola, dan struktur ruang. RDTR tersebut mencakup beberapa blok kawasan, salah satunya yaitu Blok AP yang merupakan Kelurahan Aia Pacah secara administratif. Penelitian ini akan melihat kesesuaian perkembangan ruang di Blok AP Kelurahan Aia Pacah dengan rencana pada dokumen RDTR, kemudian dikemukakan faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian penggunaan dengan rencana RDTR tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan pendekatan kualitatif. Cakupan amatan penelitian berupa Blok AP Kelurahan Aia Pacah sesuai pengelompokan Blok pada dokumen RDTR. Pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder melalui wawancara terhadap warga setempat dan dinas terkait penataan ruang terutama pada subblok yang mengalami ketidaksesuaian dengan RDTR, juga dilakukan observasi terhadap kondisi lapangan serta analisis terhadap dokumen-dokumen rencana yang didapatkan dari pihak pemerintah.

Penelitian ini melihat perkembangan dan perubahan fisik ruang yang terjadi di Blok AP Kelurahan Aia Pacah pasca penetapan sebagai pusat pemerintahan dan perkantoran Kota Padang pada rentang waktu 9 tahun, yaitu dari 2011-2018 dengan menggunakan 3 titik pembanding yaitu penggunaan ruang pada tahun 2013, 2015, dan 2018. Perkembangan fisik tersebut dilihat berdasarkan peta persebaran dan fungsi bangunan serta peta zonasi yang terdiri dari Zona Dasar, Zona Spesifik, dan Zona Teknis. faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan ruang di Blok AP Kelurahan Aia Pacah yaitu faktor perizinan dan pengawasan (pengendalian tata ruang), faktor sarana, dan faktor penduduk.

Kata Kunci: perkembangan, perubahan, pemindahan pusat pemerintahan, ketidaksesuaian



ABSTRACT

Increasing hierarchy and changing the role of an area will impact the developments acceleration, Kelurahan Aia Pacah is one of the area that has accelerated on development after being designated as Padang City Central Government. The determination of central government relocation was accompanied by the implementation of “RDTR Kawasan Aia Pacah Tahun 2012-2030”, which include zoning plans, spatial patterns and spatial structures. The RDTR document covers a number of regional blocks, AP block which is Kelurahan Aia Pacah is one of the blocks. This research will explain the suitability of AP Block Kelurahan Aia Pacah with the plan that contained in RDTR document, after classifying the area suitability this research will explain some factors that cause the appearance of unsuitable area from the compiled urban planning documents.

This research uses a deductive method with a qualitative approach. The scope of research observations is AP Block Kelurahan Aia Pacah, one of the blocks that being planned in RDTR documents. This research collected 2 kind of data that is primary and secondary, data collected through interviews with local residents and offices staff that related to spatial planning, the data collected especially in subblocks that unsuitable with RDTR document planning, the data also collected by doing observations on field conditions and by analyzing some of urban planning document.

This research defined spatial transformation and development of AP Block Kelurahan Aia Pacah after Padang city central government relocation which has occurred for 9 years from 2011 until 2018 by using 3 comparison points of time in 2013, 2015 and 2018. Spatial development is seen based on the distribution and function map of the buildings, and the zoning maps which are drawn from *Zona Dasar, Zona Spesifik, and Zona Teknis*, the factors that influence spatial unsuitability of Block AP Kelurahan Aia Pacah are: (1) permit and control of spatial factors (spatial control); (2) facilities factors, and (3) population factors.

Keywords: development, transformation, relocation of the center of government, unsuitability